STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENINGKATAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

Nadila Caurita
NPP. 32.0548

Asdaf Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: 32.0548@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dra. Wiwik Roso Sri Rejeki, M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The activation of the Digital Population Identity (IKD) in Trenggalek Regency remains low, achieving only 10.99% of the national target of 30%. This low achievement highlights serious challenges in the implementation of digital transformation in civil administration services. Key obstacles include network infrastructure issues, limited number and capacity of human resources, low digital literacy among the population, and suboptimal inter-agency integration. Comprehensive studies on strategies undertaken by local governments to address these issues are still very limited. **Purpose:** The objective of this study is to identify the obstacles and analyze the strategies implemented by the Department of Population and Civil Registration in enhancing the activation of Digital Identity Cards (IKD) in Trenggalek Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with 11 key informants, and documentation. Data analysis refers to Wheelen and Hunger's strategic management theory, which includes four stages: environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation and control. **Result:** The most significant barriers include limited internet access, lack of HR training, and resistance from the community to digital technology. Strategies implemented by the department include operator training, outreach through print and digital media, mobile service initiatives, and strengthening monitoring systems via SIAK. **Conclusion:** Activating the IKD requires comprehensive and adaptive strategies tailored to local conditions. The strategic management approach has proven effective in addressing various implementation challenges and can serve as a model for digital transformation policies in other regions.

Keywords: Digital Population Identity, Strategy, Population Administration, Trenggalek, Digital Transformation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Trenggalek masih rendah, hanya mencapai 10,99% dari target nasional sebesar 30%. Capaian ini menunjukkan adanya kendala serius dalam implementasi transformasi digital layanan administrasi kependudukan. Hambatan utama berasal dari gangguan infrastruktur jaringan, keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya integrasi antar lembaga. Kajian komprehensif terkait strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut masih sangat terbatas. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan serta untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam peningkatan aktivasi IKD di Kabupaten Trenggalek. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 11 informan kunci, serta dokumentasi. Analisis data mengacu

pada teori manajemen strategik Wheelen dan Hunger yang terdiri dari empat tahap: pemindaian lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta kontrol. **Hasil/Temuan:** Ditemukan bahwa hambatan paling signifikan berasal dari keterbatasan akses internet, kurangnya pelatihan SDM, serta resistensi masyarakat terhadap teknologi digital. Strategi yang dilakukan oleh Disdukcapil antara lain pelatihan operator, sosialisasi melalui media cetak dan digital, penyediaan layanan jemput bola, serta penguatan sistem pemantauan berbasis SIAK. **Kesimpulan:** Aktivasi IKD membutuhkan strategi komprehensif dan adaptif yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Pendekatan manajemen strategik terbukti efektif dalam merespons berbagai tantangan implementasi dan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan transformasi digital di daerah lain.

Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, Strategi, Administrasi Kependudukan, Trenggalek, Transformasi Digital

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan modern, mendorong terciptanya berbagai inovasi dalam pelayanan publik di Indonesia, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan. Salah satu implementasi nyata dari transformasi ini adalah pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat keamanan data, serta memastikan integrasi yang lebih baik dalam sistem kependudukan nasional. Dalam hal ini, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik (Munawaroh, 2018). Hal ini sejalan dengan pendapat Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk (2012), yang menyatakan bahwa transformasi digital dalam sektor publik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menuntut adanya sinergi antara teknologi, proses, dan manusia untuk mencapai hasil yang optimal.

Namun, penerapan IKD di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang beragam dan tidak merata. Di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tingkat aktivasi IKD per Januari 2024 baru mencapai 10,99% dari total penduduk wajib KTP, jauh di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Angka ini mencerminkan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan program transformasi digital di tingkat daerah, salah satunya adalah terbatasnya infrastruktur yang mendukung implementasi teknologi ini. Ripa'i (2018) menyebutkan bahwa kendala infrastruktur, khususnya di daerah dengan geografis yang terisolasi, menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. Hal ini juga diperkuat oleh Putri, A. R. S., & Adiyani (2018), yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat literasi digital di daerah-daerah terpencil turut menghambat proses adopsi teknologi baru di masyarakat. Dalam konteks global, Gil-Garcia et al. (2018) juga menekankan bahwa implementasi sistem identitas digital di sektor publik seringkali menghadapi hambatan struktural dan kapasitas institusional yang terbatas, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Beberapa faktor lain yang turut menjadi penyebab rendahnya aktivasi IKD di Trenggalek adalah keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan literasi digital, serta kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan temuan yang disampaikan oleh Putri A. R. S., & Adiyani (2018), yang mengidentifikasi bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan sah seperti KTP dan akta perkawinan turut menjadi penghambat utama dalam meningkatkan tingkat aktivasi IKD, terutama di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau.

Fenomena ini menciptakan ironi di tengah semangat digitalisasi nasional, dimana kesenjangan implementasi antara pusat dan daerah semakin terasa. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memainkan peran penting

dalam menjembatani gap ini dengan menyusun strategi yang adaptif, responsif, dan berbasis pada kondisi lokal. Munawaroh (2018), mengemukakan bahwa strategi yang hanya mengandalkan pendekatan teknis tidaklah cukup untuk mengatasi masalah ini, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan manajerial strategis yang melibatkan pemindaian lingkungan, formulasi strategi yang jelas, implementasi yang tepat, dan evaluasi berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Trenggalek serta mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Disdukcapil untuk mengatasi hambatan tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam penguatan kebijakan transformasi digital di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial serupa..

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Namun, terdapat beberapa kesenjangan penting dalam literatur yang perlu diatasi. Sebagian besar penelitian tentang penerapan IKD di Indonesia fokus pada kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sementara penelitian yang mengkaji implementasi IKD di daerah dengan kondisi geografis dan demografis tertentu, seperti Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur, masih sangat terbatas. Selain itu, banyak penelitian yang menekankan faktor teknis dan infrastruktur dalam implementasi IKD, sementara fenomena ini memerlukan pendekatan analitis yang lebih luas, mencakup dimensi sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi penerimaan dan adopsi teknologi oleh masyarakat. Sebagian besar penelitian juga lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat aktivasi dan pencapaian target, padahal pemahaman mendalam mengenai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses dan mengaktifkan IKD, serta strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memerlukan pendekatan kualitatif yang lebih komprehensif. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar hanya berfokus pada tantangan teknis dan operasional dalam implementasi IKD, sementara dampaknya terhadap efisiensi pelayanan administrasi kependudukan dan inklusi sosial masih terbatas. Terakhir, terdapat minimnya penelitian yang memberikan rekomendasi kebijakan yang terperinci dan kontekstual untuk mengatasi kendala dalam aktivasi IKD di daerah-daerah dengan karakteristik tertentu, seperti Kabupaten Trenggalek, yang memiliki tantangan infrastruktur dan kesenjangan digital yang signifikan. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan-kesenjangan tersebut dengan mengkaji hambatan dan strategi peningkatan aktivasi IKD di Kabupaten Trenggalek menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam, serta kerangka analisis multidimensi yang mempertimbangkan faktor teknis, sosial, budaya, dan institusional.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian Sasongko (2023) tentang Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung menemukan bahwa implementasi IKD di Kabupaten Bandung menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal integrasi sistem dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kesiapan teknologi dan pelatihan untuk petugas guna mendukung keberhasilan sistem identitas digital di daerah tersebut. Selain itu, Oktaviani, Septian, dan Junadi (2024) dalam penelitiannya berjudul Inovasi Pelayanan KTP-el Digital Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bojonegoro menganalisis tantangan teknis dan sosial dalam penerapan aplikasi IKD di Bojonegoro, dengan fokus pada masalah jaringan dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif

untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini, dengan memperkuat penyuluhan serta memperbaiki infrastruktur jaringan. Selanjutnya, Romawati, Hendrati, dan Wardaya (2024) dalam penelitiannya tentang Peningkatan Cakupan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Wonorejo menyarankan agar program MSIB Batch 5, yang melibatkan mahasiswa magang, dapat meningkatkan cakupan aktivasi IKD dengan metode edukasi langsung. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan langsung menjadi faktor penting dalam meningkatkan cakupan aplikasi IKD di tingkat kelurahan. Penelitian Arifin dan Nirmala (2023) juga mengkaji Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Surabaya, dan menemukan bahwa percepatan aktivasi IKD dapat dicapai melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi jemput bola, pemanfaatan media sosial, serta peningkatan kapasitas SDM sebagai bagian dari solusi komprehensif. Sementara itu, Sutrisno dan Maharani (2024), melalui studi mereka yang berjudul Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Edukasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kalimantan Timur, mengevaluasi penggunaan platform digital seperti Instagram dan TikTok dalam menjangkau kalangan muda dan meningkatkan aktivasi IKD secara signifikan. Penelitian Bella dan Widodo (2024) juga memperkuat hal tersebut dengan menyoroti peran aplikasi IKD dalam menunjang pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan mampu mempercepat proses layanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan berharga mengenai implementasi IKD, belum ada yang secara khusus mengkaji penerapan IKD di Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam dan kerangka analisis multidimensi, yang mencakup faktor teknis, sosial, dan institusional.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan beberapa kontribusi kebaruan ilmiah. Pertama, penelitian ini menggunakan kerangka analisis multidimensi yang mencakup faktor predisposisi, proksimal, presipitasi, dan mediasi untuk memahami hambatan dan strategi implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Trenggalek, yang belum pernah diterapkan di daerah dengan tantangan geografis dan digital yang signifikan. Kedua, pendekatan kualitatif mendalam digunakan untuk mengungkap kompleksitas hambatan sosial, teknis, dan budaya dalam aktivasi IKD, serta persepsi pemangku kebijakan dan masyarakat terkait penerimaan dan adopsi teknologi di daerah tersebut. Ketiga, analisis komprehensif dilakukan untuk menelusuri keterkaitan antara keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan integrasi kelembagaan dengan tingkat keberhasilan implementasi IKD, yang menjadi faktor penting mengingat kondisi sosial dan geografis Kabupaten Trenggalek yang unik. Terakhir, penelitian ini mengembangkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan berbasis bukti untuk meningkatkan aktivasi IKD, dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan serta untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam peningkatan aktivasi IKD di Kabupaten Trenggalek.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Kabupaten Trenggalek. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 11 informan yang terdiri dari pejabat pemerintah, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, operator pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta masyarakat yang telah dan belum melakukan aktivasi IKD. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, yang sesuai dengan konsep yang diuraikan oleh Sugiyono (2021), yang menyatakan bahwa teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap topik yang diteliti, sementara *snowball sampling* digunakan untuk memperluas jangkauan informan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya.

Menurut Siyoto, S., & Sodik (2015) data dilihat dari sumbernya dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyaringan data yang relevan; (2) penyajian data, yang bertujuan untuk menyusun informasi yang terkumpul menjadi gambaran yang lebih mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan, yang mengarah pada temuan-temuan utama yang dapat menjawab tujuan penelitian. Miles dan Huberman (1994) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, data harus dianalisis secara sistematis dan terus menerus selama proses penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Validasi data dilakukan menggunakan triangulasi, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sebagai teknik untuk memastikan kredibilitas temuan dan meningkatkan validitas hasil penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hambatan Dalam Peningkatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Trenggalek

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Trenggalek menghadapi sejumlah hambatan yang saling berkaitan dan mempengaruhi tingkat aktivasi sistem tersebut. Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi gangguan jaringan internet yang sering terjadi, terutama di wilayah perbukitan dan pesisir, yang menghambat proses aktivasi IKD. Selain itu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang harus menangani berbagai jenis pelayanan, menjadi tantangan besar dalam mendukung program aktivasi IKD secara optimal.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dan manfaat IKD juga menghambat partisipasi mereka dalam aktivasi, di mana masih banyak yang belum memahami konsep dan fungsi dari IKD. Terakhir, integrasi IKD dengan institusi lain, seperti puskesmas dan kantor desa, masih minim, di mana banyak layanan publik yang tetap bergantung pada dokumen fisik, sehingga mengurangi efektifitas penggunaan IKD.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terstruktur untuk mengatasi permasalahan yang ada, baik dari segi teknis, sumber daya manusia, pemahaman masyarakat, maupun integrasi lintas-institusi. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki infrastruktur digital, serta memperkuat koordinasi antar lembaga untuk memaksimalkan manfaat dari implementasi IKD di Kabupaten Trenggalek.

3.2. Strategi yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Peningkatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Trenggalek

Penulis menganalisis strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Trenggalek menggunakan

pendapat dari Wheelen dan Hunger yang terdapat dalam buku Solihin (2012) yang menyatakan bahwa analisis manajemen strategi dapat dilakukan melalui 4 tahap yaitu pemindaian lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi serta evaluasi dan kontrol. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

1. Pemindaian Lingkungan

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Trenggalek menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, keterbatasan jumlah personel dan peralatan yang sudah usang menjadi kendala besar. Selain itu, gangguan jaringan yang sering terjadi, terutama di daerah pegunungan dan pesisir, memperlambat proses aktivasi IKD. Sementara itu, pemahaman masyarakat yang rendah mengenai manfaat dan fungsi IKD, serta resistensi terhadap perubahan di kalangan lembaga pemerintah yang masih bergantung pada dokumen fisik, juga menjadi hambatan yang signifikan.

Di sisi eksternal, peluang besar terbuka untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui integrasi IKD dengan berbagai layanan lain, serta pengurangan penggunaan dokumen fisik. IKD juga memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan data kependudukan dengan fitur digital yang lebih canggih. Namun, tantangan eksternal seperti gangguan jaringan internet, rendahnya adopsi teknologi di kalangan generasi lanjut usia, serta kekhawatiran masyarakat tentang keamanan data pribadi, dapat menghambat implementasi yang lebih luas.

2. Formulasi Strategi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek telah merumuskan berbagai strategi untuk mengatasi kendala dalam implementasi program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan hasil penelitian, strategi-strategi ini mencakup pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, seperti perangkat komputer dan kendaraan operasional, serta kebijakan formal yang jelas sebagai dasar pelaksanaan IKD. Disdukcapil juga telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kendala eksternal, seperti gangguan jaringan, dengan mengembangkan strategi operasional yang mengalihkan jadwal aktivasi ke waktu dengan beban akses lebih rendah dan menggunakan sistem backup lokal.

Selain itu, strategi sosialisasi juga disesuaikan dengan segmen masyarakat yang berbeda untuk mengatasi kesenjangan digital, serta pengembangan teknologi dan sistem monitoring untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Penggunaan kegiatan jemput bola juga dimaksimalkan sebagai sarana untuk mempercepat aktivasi IKD. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, Disdukcapil Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk mencapai verifikasi dan validasi data yang lebih cepat dan akurat, menciptakan ekosistem pelayanan publik yang efisien, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik untuk mendukung pemerintahan ramah lingkungan.

3. Implementasi Strategi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek telah mengimplementasikan program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan strategi yang terstruktur meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya. Program ini dioptimalkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta mengintegrasikan kegiatan aktivasi IKD ke dalam kegiatan operasional rutin Disdukcapil.

Tabel 3.1
Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
1.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	9.414.602.261,00	9.135.963.214,00	97,04%	1,04 (efisien)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	365.163.620,00	356.099.574,00	97,52%	1,02 (efisien)

Sumber: LKjIP Disdukcapil Kabupaten Trenggalek, 2024

Dari tabel di atas dapat ditarik Kesimpulan bahwa semua anggaran yang tersedia digunakan dengan cukup maksimal oleh Disdukcapil Kabupaten Trenggalek, Dimana rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2024 digunakan secara efisien. Hal itu membuktikan bahwa dengan alokasi anggaran yang ada, disdukcapil Kabupaten Trenggalek mampu menggunakannya secara cukup maksimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Trenggalek juga telah merencanakan serangkaian program strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terstruktur, termasuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi dan komunikasi. Dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, tujuan strategis utama adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif, dan profesional. Salah satu sasaran utamanya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatnya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan fokus pada peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di tingkat dinas.

Selain itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan tertib administrasi kependudukan, yang dilaksanakan melalui sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Berbagai strategi yang diterapkan mencakup penerapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif berbasis teknologi dan komunikasi. Kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil, peningkatan kualitas database kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan yang lebih baik. Disdukcapil juga berfokus pada peningkatan inovasi pelayanan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan.

4. Evaluasi dan Kontrol

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek melakukan kontrol terhadap capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala. Kontrol ini dilakukan dengan cara memantau perkembangan aktivasi setiap hari, baik oleh operator di kantor Disdukcapil, UPT, maupun desa. Selain itu, evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis data capaian aktivasi yang terpantau melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), yang memungkinkan pemantauan secara *real-time*.

Disdukcapil Kabupaten Trenggalek juga melakukan evaluasi mingguan dan bulanan melalui koordinasi dengan tim UPT dan petugas desa. Dalam evaluasi ini, fokus diberikan pada

desa-desa yang capaian aktivasi IKD-nya masih rendah. Program jemput bola dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan angka aktivasi di wilayah tersebut.

Evaluasi tidak hanya terbatas pada data capaian, tetapi juga melibatkan pemberian asistensi langsung kepada operator yang mengalami kendala teknis. Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan intensif, Disdukcapil Kabupaten Trenggalek dapat terus melakukan perbaikan dalam implementasi program aktivasi IKD untuk mencapai target yang diinginkan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Trenggalek menghadapi beberapa hambatan, termasuk masalah teknis terkait ketidakstabilan jaringan, keterbatasan infrastruktur digital, dan kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan bagi kelompok usia lanjut. Data yang diperoleh menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam angka aktivasi IKD dari tahun 2022 hingga 2024, namun capaian aktivasi masih tergolong rendah, dengan hanya 10,99% dari total penduduk wajib KTP yang telah melakukan aktivasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sasongko (2023) tentang penerapan IKD di Kabupaten Bandung, yang menunjukkan bahwa kendala serupa, seperti keterbatasan infrastruktur, juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Oktaviani et al. (2024) tentang penerapan aplikasi IKD di Kabupaten Bojonegoro, yang menekankan pentingnya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dalam mengatasi kendala kesadaran dan pemahaman terhadap teknologi.

Seiring dengan temuan dari Romawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa edukasi langsung dapat meningkatkan cakupan aktivasi IKD, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan lebih komprehensif dan adaptif yang mempertimbangkan faktor-faktor teknis, sosial, dan institusional dalam memfasilitasi adopsi teknologi ini.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Trenggalek masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya SDM yang memadai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini menyebabkan angka aktivasi IKD yang masih jauh dari target nasional, dengan capaian hanya 10,99% per Januari 2024. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui strategi seperti pelatihan berjenjang bagi operator, sosialisasi yang lebih luas, dan penguatan sistem monitoring dengan SIAK. Meskipun ada peningkatan, perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai target nasional. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat diterapkan di daerah serupa, serta model analisis yang relevan untuk memperbaiki implementasi IKD di tingkat kabupaten/kota.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada pengumpulan data yang kurang luas dari masyarakat karena keterbatasan waktu dan sumber daya.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di daerah lain dengan kondisi serupa untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam implementasi IKD.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Nirmala, S. (2023). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Surabaya. *Jurnal Organisasi dan Manajemen Informasi Pemerintahan (JOGIV)*, 6(3), 12–25. Tersedia secara daring di: <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/5800>
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 14-31. <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/24745>
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). *Digital government and public management research: Finding the crossroads*. *Public Management Review*, 20(5), 633–646. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181>
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). *Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government*. *Information Systems Management*, 29(4), 258–268. <https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Munawaroh, N. (2018). Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi: Kasus Pelayanan Pembuatan E-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. *Jurnal Dukcapil*, 6(1), 21-46. <https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JKCS/article/view/370>
- Oktaviani, L., Septian, E., & Junadi, F. (2024). Inovasi Pelayanan KTP-el Digital Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 34-50. <https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/498/>
- Putri, A. R. S., & Adiyani, C. Z. (2018). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Jurnal Dukcapil*, 6(1), 87-104. <https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JKCS/article/view/373>
- Ripa'i, A. (2018). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Single Identity Number di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil*, 6(1), 67-85. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/download/372/210>
- Romawati, A., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Peningkatan Cakupan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Wonorejo. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 5(3), 88-102. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/515>
- Sasongko, W. S. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dukcapil*, 7(2), 45-60. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view>
- Siyoto, dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Solihin, I. 2012. *Manajemen Strategik*. Edisi Pertama. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, H., & Maharani, V. (2024). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Edukasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kalimantan Timur. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 8(1), 45–60. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view>